

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* di Kelurahan Depok Sleman Yogyakarta**

**Kurnia Ningsih**

Disnakertrans Jl. Ringroad Utara Yogyakarta

email: ningsihkurnia105@gmail.com

### **Abstract**

*One important principles of good governance in public services is public participation. since good governance is a conception of a clean, democratic, and effective governmental administration, it regulate a synergistic and constructive relationship between the government, private business world and society. This research combines both quantitative and qualitative methods as mixed methods. Based on simple linear regression analysis results, it is found that technological training, participation in law and government, financial governance and assets and development of managerial values have a significant positive effect on implementation of good governance. The advice in this research is the application of technology training should be done effectively, with technological training to the employees themselves, especially in the use of computerization and internet in order to achieve tujuan that want to be achieved by trade and industry service.*

*Keywords: good governance, technology training, participation in law and government*

### **Abstrak**

Salah satu prinsip *good governance* yang penting dalam pelayanan publik adalah partisipasi. *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Penelitian ini menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, atau dikenal dengan sebutan mixed methods. berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, ditemukan bahwa variabel pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Saran dalam penelitian ini adalah penerapan pelatihan teknologi hendaknya dilakukan dengan efektif, dengan dimbangi pelatihan teknologi terhadap pegawai itu sendiri khususnya dalam penggunaan komputerisasi dan internet guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh dinas perdagangan dan industri.

Kata kunci: *good governance*, pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang saat ini masih terhitung sebagai negara berkembang tengah berupaya untuk terus meningkatkan perekonomiannya dengan harapan keluar dari status negara berkembang dan menjadi suatu negara yang maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance* (Prasojo dan Kurniawan, 2008). *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat (Haryanto dan Sahrudin, 2007).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat (2) huruf f yang menjelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, pada pasal 221 ayat (1) secara tegas menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan telah dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat telah memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Jadi, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembentukan kecamatan.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah (Tangkilisan, 2005). Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang setelahnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Se jauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya (Fadli, *et al.*, 2014).

Terkait dengan penjelasan sebelumnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 ayat (1) bahwa konsep *good governance* diperlukan agar kecamatan dapat meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Mengenai konsep *good governance* ini tentunya telah banyak literatur dan penelitian-penelitian yang membahasnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Melandi Dwiyaniti Selamat (2013) terkait penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menganalisis prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu prinsip *good governance* yang penting dalam pelayanan publik adalah partisipasi. Menurut Wahyuni

(2006), tujuan dari partisipasi publik pada dasarnya mengomunikasikan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Lebih jauh lagi peran masyarakat dalam pelayanan publik adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan serta dukungan langsung dalam proses pemberian pelayanan publik.

Kurangnya pribadi yang terlatih dan pengetahuan masyarakat dalam hukum dan teknologi informasi menyebabkan masyarakat terbungkus dalam keterbatasan informasi. Selain itu terdapat budaya lokal yang terkadang menghalangi pada upaya memperkenalkan internet dan pengetahuan baru yang mengarah pada kurangnya pemahaman masyarakat pengetahuan hukum dan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Oleh atas karena itu, dalam makalah ini akan dibahas factor-faktir yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance* di lembaga publik.

## 2. LANDASAN TEORITIS

### 2.1. Pengertian pelayanan

Pengertian pelayanan menurut *American Marketing Association*, seperti dikutip oleh Donald (Hardiansyah, 2011:10), bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Menurut Poerwadarminta, dilihat dari sisi etimologis, pelayanan berasal dari kata *layan* yang berarti membantu menyiapkan/mengurus kebutuhan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai

perihal/cara melayani, servis/jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (Hardiansyah, 2011:11).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktifitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat – sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan servis kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Hardiansyah, 2011:11).

### 2.2. *Good governance*

Lebih lanjut dikemukakan bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Widodo, 2001). Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Administrasi Negara dan Badan

Sedarmayanti, (2004) sebagaimana dikutip sedarmayanti mengungkapkan “unsur-unsur utama *governance* (bukan prinsip) yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, Ganie Rahman (2000), menyebutkan ada empat unsur utama yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.

### **2.3. Akses terhadap pelatihan teknologi informasi**

Teknologi informasi telah diakui memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Teknologi informasi juga dianggap berperan besar dalam penegakan hukum dan peraturan pemerintah (Emirzon, *et al.*, 2006). Namun, dengan keterbatasan infrastruktur, dapat menghambat manfaat TI bagi penegakan hukum dan peraturan negara ditambah lagi dengan kecurigaan sektor publik berkenaan dengan budaya kerahasiaan tentang informasi, dan kurangnya kenyamanan yang berhubungan dengan sektor swasta, maka penyebaran akses terhadap TI dianggap memunculkan kendala lain yang ditolak oleh masyarakat tradisional.

Dengan demikian dibutuhkan kapasitas yang berbeda misalnya, sebagai rekanan kerja, penasehat hukum, manajer informasi teknologi, pengawas keuangan, pengawas kualitas, dan ahli hukum dan teknologi untuk mendukung pelayanan TI

dan membina hubungan dengan masyarakat.

Meskipun TI dianggap mengurangi praktek korupsi dalam kegiatan publik dengan mempromosikan lingkungan kerja yang baik dan terbuka, dan terjalin kerjasama. namun, dengan keterbatasan ketrampilan TI, memunculkan tantangan bagi pelaksanaan TI di tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan kurangnya ketrampilan pendukung seperti kemampuan bahasa untuk mengoperasikan perangkat komputer, dianggap ikut menyuburkan praktek korupsi berkaitan dengan kontrak bisnis maupun penggunaan catatan sektor publik, kartu rasio, pendaftaran tanah dan sebagainya. Dengan demikian, dibutuhkan perluasan akses terhadap pelatihan TI yang perlu terus digalakkan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola publik yang lebih baik (Maliki, 2010).

Partisipasi gender juga dianggap penting dalam mempromosikan akses terhadap TI (Lestari, 2011). Namun, biasanya wanita menghadapi kesulitan dalam pembagian tugas rumah tangga, perawatan anak dan bekerja. Meskipun terdapat antusias dari staf khususnya wanita namun, terkadang terhadap hambatan dan pemaksaan pembatasan oleh organisasi dan masyarakat tradisional untuk bekerja dan memperoleh uang dalam usaha yang didominasi laki-laki. Meskipun masyarakat tradisional cenderung mengerti bahwa upah tidak tergantung pada *gender* tetapi ditentukan oleh tingkat pendidikan, namun terdapat tantangan utama pada *issue gender* dan juga perluasan akses TI ke pada wanita dikarenakan lingkungan yang tidak aman untuk belajar dan bekerja bagi wanita.

#### **2.4. Partisipasi dalam hukum dan pemerintahan**

Permasalahan lain dalam tata kelola pemerintahan ialah masalah hukum. Seringkali masalah hukum muncul akibat perbedaan tingkat pemahaman terhadap hukum dan hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat (Siahaan, 2004). Hal ini berakibat kebingungan dihadapi pemerintah daerah dalam menegakkan hukum. Misalnya, dalam kasus yang sering dihadapi perhutani dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Mereka seringkali telah berseberangan dengan pemikiran masyarakat adat mengenai pendudukan lahan-lahan perkebunan atau lahan-lahan hutan tanpa izin. Dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, proses-proses penyelesaian kasus telah melibatkan pemerintah Daerah, BPN, atau DPRD. Pada beberapa kasus, jalur non-litigasi di pemerintahan daerah membuat kasus-kasus agraria tetap terpelihara, kian menumpuk, dan berdampak luas, serta berpotensi meledak setiap saat.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum dan perbedaan penafsiran hukum nasional dan hukum adat yang mengakibatkan masalah sosial ekonomi yang terus berkepanjangan.

LSM dapat berperan dalam menyebarkan pengetahuan hukum namun juga dapat mengakibatkan pertentangan yang lain bila masyarakat tradisional tidak siap mengantisipasi perkembangan dan perubahan hukum dan peraturan terbaru. Hal ini mengakibatkan pertentangan dan demonstrasi yang dapat melemahkan kedudukan dan reputasi pemerintah daerah. Misalnya, dalam kasus aksi demonstrasi di Kota Luwuk yang

dilakukan bersama Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah yang memunculkan pelanggaran hukum sesuai pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Eva Susanti Bande juga didakwa dengan pasal 406 ayat 1 kuhp jo. Pasal 55 ayat (2)

Permasalahan ini muncul karena masyarakat tidak mengawal proses pembentukan regulasi dan juga ketiadaan aktivis yang aktif dalam pemantauan latar belakang perkara atau akar konflik yang berakibat pelaksanaan hukum menjadi tidak berjalan seperti diharapkan bersama.

#### **2.5. Tata kelola keuangan dan aset**

Keuangan Negara telah diatur dalam UU Keuangan Negara. Menurut pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, Kekayaan Negara menjadi sumber keuangan negara dan pelanggarannya tunduk dalam uu tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena kekayaan negara rentan terhadap korupsi. Pengelolaan keuangan negara telah disesuaikan dengan kesejahteraan rakyat sebagai sasaran tujuannya (Tangkilisan, 2005). Namun hingga kini masih beragam pendapat mengenai cara mengelola keuangan dan aset negara agar negara dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pembahasan urgensi manajemen aset sejak tahun 1970-an pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait dengan pengelolaan aset, akan tetapi sampai sekarang manajemen aset kita masih terpuruk, masih dalam proses pembenahan, artinya belum sampai kepada tahap dimana setiap saat pimpinan dapat memantau keberadaan aset di bawah penguasaannya secara cepat dan akurat. Hal ini terbukti, diantaranya bahwa belum

seluruhnya unit kerja dalam suatu instansi telah melakukan inventarisasi aset, sehingga otomatis nilai aset secara keseluruhan tidak diketahui yang pada akhirnya penyajian di dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya. Kondisi seperti ini terjadi hampir seluruhnya pada instansi yang memiliki aset besar seperti Departemen Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya yang pada umumnya mempunyai ratusan unit kerja dibawahnya.

Aset diperoleh dari pengadaan barang melalui mekanisme APBN atau APBD yang menjadi cikal bakal penyajian aset di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Memasuki tahun ke empat sejak LKPP diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2004, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum beranjak dari disclaimer atau tanpa memberikan pendapat. Dari berbagai alasan inti tentang konsideran BPK memberikan pendapat seperti tersebut di atas salah satunya terkait dengan tidak terinventarisasinya aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. Jadi, bagaimana sebenarnya manajemen aset bisa mengatasi kondisi ini sehingga aset dapat tercatat dan terpelihara dengan baik melalui manajemen aset yang memadai

## **2.6. Pengembangan nilai manajerial**

Nilai manajerial berkaitan dengan pencapaian kemanfaatan hubungan eksternal melalui tata kelola yang baik. Hal ini juga berguna untuk membantu pemerintah mengatur pelaksanaan lebih hati-hati dengan mencari untuk mengembangkan efisiensi pemerintahan

(Manossoh, 2015). Analisa serangkaian nilai manajerial setelahnya memfokuskan secara mendasar pada penilaian pasar. Hal itu hanya melalui persediaan konsumen baru bahwa pemerintah akan mampu melanjutkan bisnis mereka di masa mendatang. Analisa serangkaian nilai manajerial juga membantu pemerintah untuk menyoroti kelemahan dalam kebijakan dan implementasinya.

Hal ini dimulai dengan mengidentifikasi pilihan strategi kebijakan dan menyarankan pemecahan persyaratan dan tindakan operasional khusus untuk menghasilkan solusi dan pembaharuan (*upgrade*) termasuk pembaruan ketrampilan melalui program pelatihan dengan menjaga hubungan input-output yang diidentifikasi dan menyatu dengan jaringan faktor kesuksesan. Hal ini berguna untuk mengelola tata kelola daya saing dan mengembangkan kapasitas staf melalui pelatihan organisasi, konsultan dan individu.

Dukungan dari agen pemerintah dalam bentuk ketrampilan manajerial sangat penting untuk menumbuhkan kepemimpinan dan dukungan bidang organisasi. Melalui agen pemerintah, masyarakat dapat belajar mengatasi masalah yang signifikan, misalnya, manajerial keuangan dan pengetahuan informasi bisnis lokal dan jaringan sosial. Selain itu, dukungan dapat berlanjut dari agen pemerintah untuk membuka akses pada pasar melalui bimbingan agen pemerintah tentang kontrak, pemasaran individu dan membuka pasar swasta.

## **3.METODOLOGI**

Penelitian ini menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, atau dikenal dengan sebutan *mixed*

*methods* (Sarwono, 2011). Penggunaan metode tersebut dilandasi premis bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di kecamatan panakkukang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya yang terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Depok Sleman Yogyakarta. Dipilihnya Kantor Kecamatan Depok Sleman karena di tempat inilah pusat segala aktifitas pemerintah Kecamatan Depok Sleman dilakukan. Dengan demikian peneliti akan mudah dalam mengumpulkan data sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan Depok Sleman dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Depok Sleman.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan “*purposive sample*” yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun yang menjadi respondennya lebih lanjut dirinci sebagai berikut:

- a. Informan terdiri dari (i) kepala Kecamatan Depok Sleman, (ii) sekretaris kecamatan Panakkukang sub bagian umum dan kepegawaian, (iii) sub bagian keuangan dan perlengkapan, dan (iv) kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Depok Sleman.
- b. responden yang direncanakan adalah responden tokoh masyarakat (agama, pemuda, perempuan, guru/pendidik, dll) yang ada di setiap dusun. Adapun rinciannya diberikan pada Tabel 1.

**4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Melalui daftar pertanyaan didapat kondisi responden tentang jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat pendidikan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum dari responden sebagai obyek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti pada Tabel 1.

Tabel.1. Karakteristik responden  
Tabel.1. Karakteristik responden dalam penelitian ini

Respondent	Total	
	Orang	%
<b>Jenis kelamin</b>		
• Pria	16	48.5 %
• Wanita	17	51.5 %
<b>Usia</b>		
• 25-30 tahun	2	6 %
• 30-35 tahun	9	27.3 %
• 35-40 tahun	11	33.3 %
• 40-45 tahun	7	21.2 %
• 45-50 tahun	4	12.1 %
• > 50 tahun	-	-
<b>Latar belakang pendidikan</b>		
• Smp	5	15.2 %
• Sma	13	39.4 %
• (d3, s1),	14	42.4 %
• S2	1	3.0 %

Sumber: Hasil wawancara

Berdasarkan jenis kelamin rata-rata responden adalah berjenis kelamin wanita sebanyak 17 orang atau (51,5%) dan pria berjumlah 16 orang atau sekitar (48,5%). Berdasarkan usia seperti diperlihatkan pada Tabel 4.1. Sebagian besar responden berusia antara 35-40 tahun yaitu 11 responden atau diperoleh presentasi sebesar 33,3 %, penilaian terbanyak kedua berdasarkan faktor usia ini berada pada usia 30-35 tahun sebanyak 9 responden atau dengan memperoleh nilai presentasi sebesar 27,3 %, penilaian terbanyak ketiga 40-45 tahun sejumlah 7 responden atau dengan memperoleh nilai presentasi sebesar 21,2 % dan responden pada rentang usia 45-50 tahun sebanyak 4 responden atau sekitar 12,1 % dan terakhir responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 2 orang atau sekitar 6 %. Hal ini mencerminkan bahwa hasil penelitian mengenai karakteristik responden dilihat dari tingkat usia pada pegawai Kecamatan Depok Sleman adalah pada rentang usia 35-40 tahun. Profil responden berdasarkan pendidikan diperlihatkan pada Tabel 4.1. Dari 33 responden yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas responden berpendidikan S1 dengan jumlah 14 responden atau dengan mendapatkan nilai persentase sebesar 42,4 %, urutan kedua terbanyak adalah responden dengan pendidikan SMA sejumlah 13 responden atau dengan mendapatkan nilai persentase sebesar 39,4 %, urutan ketiga terbanyak merupakan responden dengan pendidikan SMP dengan jumlah 5 responden atau mendapatkan nilai persentase sebesar 15,2 % dan yang terakhir dengan pendidikan S2 sebanyak 1 responden atau 3,0 %. Hal ini mencerminkan bahwa hasil penelitian

mengenai karakteristik responden dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di kecamatan Depok Sleman adalah memiliki tingkat pendidikan S1.

#### **4.1. Hasil uji reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode *alpha-cronbach*. Standard yang digunakan dalam menentukan reliabel dan tidaknya suatu variabel penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai *r*-hitung dengan *r*-Tabel pada taraf kepercayaan 95 % atau tingkat signifikansi 5%. Apabila dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode *Alpha-Cronbach*, maka nilai *r*-hitung diwakili oleh nilai *alpha*. Menurut Santoso (2001:227), apabila *Cronbach's Alpha* hitung lebih besar dari pada *r*-Tabel dan *alpha* hitung bernilai positif, maka suatu instrumen penelitian dapat disebut reliabel.

Setelah dilakukan analisa terhadap item dengan bantuan program spss ver.16.00 menggunakan analisis reliabilitas, maka diperoleh skala variabel seperti pada Tabel 2.

Berdasarkan ketentuan pada Tabel 2, yaitu nilai *cronbach's alpha* pada Tabel reliabilitas sama dengan atau lebih besar dari 0.60 maka pertanyaan tersebut adalah reliabel (dapat diandalkan). Nilai reliabilitas yang diperoleh dengan model *cronbach's alpha* antara 0.897 - 0.952 dan

daerah titik kritis penerimaan 0.60, karena nilai *cronbach's alpha* > 0.60, maka pertanyaan-pertanyaan pada variabel *good governance*, pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial yang diajukan tersebut sudah reliabel (dapat diandalkan).

**4.2. Hasil uji regresi linier berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana fluktuasi variabel dependen melalui dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini

ada dua variabel independen yang akan digunakan yaitu pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah *good governance*.

Hasil analisis regresi linier berganda antara pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial, terhadap *good governance* adalah diberikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Uji reliabilitas terhadap *good governance*

Variable	Cronbach's alpha	Titik kritis	Keputusan	Keterangan
<i>good governance</i>	0.906	0.60	H <sub>0</sub> ditolak	Reliabel
Pelatihan teknologi	0.945	0.60	H <sub>0</sub> ditolak	Reliabel
Partisipasi dalam hukum dan pemerintahan	0.919	0.60	H <sub>0</sub> ditolak	Reliabel
Tata kelola keuangan dan asset	0.897	0.60	H <sub>0</sub> ditolak	Reliabel
Pengembangan nilai manajerial	0.952	0.60	H <sub>0</sub> ditolak	Reliabel

Sumber: hasil pengolahan spss ver.16.0

Tabel 3. Hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	.479	.789		.607	.546
Partisipasi dalam hukum dan pemerintahan	1.054	.120	1.335	8.790	.000
Pelatihan teknologi	.276	.049	.393	5.605	.000
Tata kelola keuangan dan asset	.934	.129	.834	7.264	.000
Pengembangan nilai manajerial	.621	.354	.729	1.607	.042

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	.479	.789		.607	.546
Partisipasi dalam hukum dan pemerintahan	1.054	.120	1.335	8.790	.000
Pelatihan teknologi	.276	.049	.393	5.605	.000
Tata kelola keuangan dan asset	.934	.129	.834	7.264	.000
Pengembangan nilai manajerial	.621	.354	.729	1.607	.042

A. Dependent variable: implementasi *good governance*

Dari hasil perhitungan SPSS pada Tabel 3 atas dapat diperoleh rumusan persamaan regresi linier berganda untuk variabel independen (pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial) terhadap variabel dependen (implementasi *good governance*) sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0.479 + 1.054 x_1 + 0.276x_2 + 0.934 x_3 + 0.621 x_4 + e$$

Hasil perhitungan analisis mengidentifikasikan bahwa nilai a (konstanta) sebesar 0.479 berarti jika tidak ada variabel independen (pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial), maka implementasi *good governance* akan sebesar 0.479.

Nilai b1 (koefisien pelatihan teknologi) sebesar 1.054 menunjukkan adanya pengaruh positif atau penerimaan pelatihan teknologi terhadap implementasi *good governance*, berarti bahwa tiap kenaikan sebesar satu satuan pada

pelatihan teknologi akan meningkatkan implementasi *good governance* sebesar 1.054 dengan asumsi variable lain tetap.

Nilai b2 (koefisien partisipasi dalam hukum dan pemerintahan) sebesar 0.276 menunjukkan adanya pengaruh positif atau penerimaan partisipasi dalam hukum dan pemerintahan terhadap implementasi *good governance*, berarti bahwa tiap kenaikan sebesar satu satuan pada partisipasi dalam hukum dan pemerintahan akan meningkatkan implementasi *good governance* sebesar 0.276 dengan asumsi variable lain tetap.

Nilai b3 (koefisien tata kelola keuangan dan asset) sebesar 0.934 menunjukkan adanya pengaruh positif atau penerimaan tata kelola keuangan dan asset terhadap implementasi *good governance*, berarti bahwa tiap kenaikan sebesar satu satuan pada tata kelola keuangan dan asset akan meningkatkan implementasi *good governance* sebesar 0.934 dengan asumsi variable lain tetap.

Nilai b4 (koefisien pengembangan nilai manajerial) sebesar 0.621

menunjukkan adanya pengaruh positif atau penerimaan pengembangan nilai manajerial terhadap implementasi *good governance*, berarti bahwa tiap kenaikan sebesar satu satuan pada pengembangan nilai manajerial akan meningkatkan implementasi *good governance* sebesar 0.621 dengan asumsi variable lain tetap.

**4.3. Hasil uji r<sup>2</sup> (koefisien determinasi)**

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen (pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial) secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen (implementasi *good governance*). Dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS ver. 16.00 dapat dilihat nilai r<sup>2</sup> (*adjusted r square*) pada Tabel 4.

Dari Tabel 3 di atas hasil korelasi r sebesar 0,738, hal ini memberi arti bahwa secara bersama-sama pelatihan teknologi,

partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial mempunyai hubungan yang positif, searah, dan sangat tinggi dengan implementasi *good governance*. Jika nilai pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial naik, maka nilai implementasi *good governance* juga akan naik.

Nilai koefisien determinasi r<sup>2</sup> (*adjusted r square*) sebesar 0,738 atau 73,8%. artinya kontribusi variabel-variabel bebas secara bersama-sama yaitu pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial terhadap implementasi *good governance* adalah sebesar 73,8% sedangkan sisanya sebesar 26,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4. Hasil koefisien determinasi

**Model summary<sup>b</sup>**

Model	R	R square	Adjusted square	Std. Error of the estimate
1	.794	.738	.739	1.135

A. Predictors: (constant), pelatihan teknologi, partisipasi dalam hukum dan pemerintahan, tata kelola keuangan dan asset dan pengembangan nilai manajerial

B. Dependent variable: implementasi *good governance*

Sumber: hasil pengolahan spss ver.16.00

**4.4. Uji hipotesis dan analisis**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, variabel pelatihan teknologi diperoleh koefisien regresi

sebesar 0.479 dan nilai t hitung = 5.605 dengan tingkat signifikansi 0.000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0.05, didapat t Tabel sebesar 0.682. Ini berarti t

hitung lebih besar dari  $t$  Tabel, yaitu 5.605 lebih besar dari 0.682, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian pertama ( $H_1$ ) dapat diterima atau terbukti. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa pelatihan teknologi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pelatihan teknologi penting dan berpengaruh dalam meningkatkan implementasi *good governance*. Teknologi informasi telah diakui memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Teknologi informasi juga dianggap berperan besar dalam penegakan hukum dan peraturan pemerintah. Namun, dengan keterbatasan infrastruktur, dapat menghambat manfaat  $t_i$  bagi penegakan hukum dan peraturan negara ditambah lagi dengan kecurigaan sektor publik berkenaan dengan budaya kerahasiaan tentang informasi, dan kurangnya kenyamanan yang berhubungan dengan sektor swasta, maka penyebaran akses terhadap  $t$  hitung dianggap memunculkan kendala lain yang ditolak oleh masyarakat tradisional.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, variabel partisipasi dalam hukum dan pemerintahan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.479 dan  $t$  hitung = 8.790 dengan tingkat signifikansi 0.000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0.05, didapat  $t$  Tabel sebesar 0.682. Ini berarti  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  Tabel, yaitu 285.548 lebih besar dari 0.682, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian kedua ( $H_2$ ) dapat diterima atau terbukti. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa partisipasi dalam hukum

dan pemerintahan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Hal ini berakibat kebingungan dihadapi pemerintah daerah dalam menegakkan hukum. Misalnya, dalam kasus yang sering dihadapi perhutani dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Mereka seringkali telah berseberangan dengan pemikiran masyarakat adat mengenai pendudukan lahan-lahan perkebunan atau lahan-lahan hutan tanpa izin.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, variabel tata kelola keuangan dan asset diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.479 dan  $t$  hitung = 7.264 dengan tingkat signifikansi 0.000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0.05, didapat  $t$  Tabel sebesar 0.682. Ini berarti  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  Tabel, yaitu 7.264 lebih besar dari 0.682, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian kedua ( $H_3$ ) dapat diterima atau terbukti. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa tata kelola keuangan dan asset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan dan asset penting dan berpengaruh dalam meningkatkan implementasi *good governance*. Hal ini terbukti, diantaranya bahwa belum seluruhnya unit kerja dalam suatu instansi telah melakukan inventarisasi aset, sehingga otomatis nilai aset secara keseluruhan tidak diketahui yang pada akhirnya penyajian di dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, variabel pengembangan nilai manajerial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.479 dan  $t$  hitung = 1.607 dengan tingkat signifikansi 0.000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0.05, didapat  $t$  Tabel sebesar 0.682. Ini berarti  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  Tabel, yaitu 1.607 lebih besar dari 0.682, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian kedua ( $H_4$ ) dapat diterima atau terbukti. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa pengembangan nilai manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Hal ini juga berguna untuk membantu pemerintah mengatur pelaksanaan lebih hati-hati dengan mencari untuk mengembangkan efisiensi pemerintahan. Analisa serangkaian nilai manajerial setelahnya memfokuskan secara mendasar pada penilaian pasar. Hal itu hanya melalui persediaan konsumen baru bahwa pemerintah akan mampu melanjutkan bisnis mereka di masa mendatang. Analisa serangkaian nilai manajerial juga membantu pemerintah untuk menyoroiti kelemahan dalam kebijakan dan implementasinya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

Variabel teknologi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pelatihan teknologi penting dan berpengaruh dalam meningkatkan implementasi *good governance*.

Selanjutnya, tata kelola keuangan dan asset memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan dan asset penting dan berpengaruh dalam meningkatkan implementasi *good governance*.

Akhirnya, hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan nilai manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi *good governance*. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengembangan nilai manajerial penting dan berpengaruh dalam meningkatkan implementasi *good governance*..

### 5.2. Saran

Penerapan pelatihan teknologi hendaknya dilakukan dengan efektif, dengan dimbangi pelatihan teknologi terhadap pegawai itu sendiri khususnya dalam penggunaan komputerisasi dan internet guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Industri.

Kecamatan selalu mengadakan evaluasi secara rutin terhadap penerapan pelatihan teknologi khususnya penggunaan komputer dan internet guna mempertahankan kinerja yang telah ada dan melakukan evaluasi secara inovasi bagi kemajuan instansi yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. S., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government (studi pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia) (fakultas ekonomika dan bisnis).

- Emirzon, J., & Sriwijaya, B. F. H. U. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 4 (8), 93-114.
- Fadli, F., Madani, M., & Idris, M. (2014). Transparansi pemerintah dalam pelayanan sertifikat tanah di kota makassar. *Otoritas:jurnal ilmu pemerintahan*, 4 (2).
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Gava Media.
- Haryanto, Sahnuddin dan Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widodo, J.. (2001). *Good governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia, Surabaya. hal 18
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Administrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta. hal.15
- Lestari, R. B. (2011). Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Teknomatika*, 1 (1), 84-93.
- Maliki, I. (2010, June). Manajemen Resiko Teknologi Informasi I Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL VERSI 3). In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI).
- Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (5).
- Rahman, M.G. (2000). “*Good governance*, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta.hal 43
- Prasetyo, P. E. (2008). The Quality of Growth:Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK:Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1 (1).
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi birokrasi dan *good governance*:kasus best practices dari sejumlah daerah di indonesia. Dipresentasikan dalam the 5th international symposium of journal antropolgi indonesia.
- Sarwono, J. (2011). *Mixed Methods*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti, 2004. *Good governance* (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju *Good governance*, Mandar Maju, Bandung. hal 43
- Selamat, M. D. 2013. Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Semarang: Universitas Diponegoro.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.

Tangkilisan, h. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.

Wahyuni, S. (2006). *Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*.